

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur,
Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

NURHAFIFAH ZULTHA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF KAMPUNG KB PROGRAM TO REDUCE POVERTY (A Study at Kota Karang Raya Village, Sub-District of Teluk Betung Timur, Bandar Lampung)

By

NURHAFIFAH ZULTHA

The program of Kampung KB is one of the innovations of government programs in strengthening Family Planning and Family Development program by narrowing the scope of the target at the level of region/ village. The purpose of the program is to improve the life quality of the community at the village level and to realize a quality small family. This study aims to analyze the implementation of Kampung KB program in Kota Karang Raya village as well as to find out the obstacles in the implementation of the program of Kampung KB in Kota Karang Raya village. The type of the research is descriptive research with qualitative approach.

The results of the research showed that from four indicators of the program, three of them have been achieved well, namely: communication indicator, disposition and bureaucracy structure, this was because in the implementation of the program of Kampung KB, the program executor and the target were already maximum. Yet the indicators of resources have not met the requirements because of the inadequate facilities. Among the obstacles in the implementation of Kampung KB program were: insufficient budgets and the lack of participation and awareness of the community in Kota Karang Raya village. The researcher recommended suggestions: the posts of Kampung KB are to be separated from village's office, and in the socialization, the BKKBN (National Population and Family Planning Board) Lampung should motivate the community to participate in the implementation of Kampung KB program in Kota Karang Raya village.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Poverty, Kampung KB Program

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)

Oleh

NURHAFIFAH ZULTHA

Program Kampung KB merupakan salah satu inovasi program pemerintah dalam memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu dalam tingkat wilayah/desa/kelurahan. Tujuan dari program Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa/kelurahan serta dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari empat indikator implementasi program yang digunakan dalam penelitian ini, tiga diantaranya sudah dapat tercapai dengan baik, yakni pada indikator komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi, karena dalam pelaksanaan program Kampung KB pelaksana dan target sasaran sudah maksimal. Sedangkan indikator sumberdaya belum mampu tercapai dengan baik, karena fasilitas yang masih kurang memadai. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB adalah kurangnya anggaran, serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat di Kelurahan Kota Karang Raya. Peneliti merekomendasikan saran yaitu, sebaiknya fasilitas seperti posko Kampung KB dibuat terpisah dari kantor Kelurahan, dan dalam melakukan sosialisasi pihak BKKBN Lampung sebaiknya lebih bisa memotivasi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya.

**Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik,
Kemiskinan, Program Kampung KB**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur,
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

NURHAFIFAH ZULTHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
(Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan
Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Nurhafifah Zultha

No. Pokok Mahasiswa : 1316041082

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.
NIP 19850620 200812 2 001

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.

Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Penguji Utama : Dra. Dian Kagungan, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurhafifah Zultha, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 Desember 1994. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tolha dan Ibu Zulailla. Penulis menempuh jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Palapa Bandar Lampung. Pendidikan selanjutnya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswi, penulis berkesempatan berorganisasi dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan terdaftar sebagai anggota Himagara pada Bidang Hubungan Luar (HUBLU) FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Lok, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat selama 60 hari.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. AL Insyirah:5)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan
dengan kesanggupannya”

(QS. AL Baqarah:286)

“Hidup adalah sebuah impian yang harus diwujudkan
dan hidup adalah suatu perjalanan yang harus diselesaikan”

(Nurhafifah Zultha)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama ALLAH SWT

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Tolha dan Ibu Zulaila

Yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat, dukungan, serta motivasi. Terimakasih atas keikhlasan dan ketulusan serta doa yang tak henti-hentinya yang selalu kalian berikan.

Adikku tersayang Ahmad Afandi Zultha

Terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya.

Untuk Keluarga besarku, Sahabat-sahabat tercinta, dan

Teman-teman seperjuanganku

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

ALMAMATER TERCINTA, UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWANCANA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam semesta berupa isinya, dengan rasa syukur selalu kpuanjatkan atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya.

2. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan saran, nasihat dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D. selaku dosen Pembimbing Utama yang selalu bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, dan memberikan saran serta nasihat kepada penulis selama proses bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak kepada Ibu, semoga segala keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam mendidik serta membimbing saya selama ini mendapatkan berkah dari Allah SWT.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen Pembimbing Kedua yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, motivasi serta nasihat kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi. Terimakasih banyak Ibu, semoga keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam membimbing dan mendidik saya selama ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
6. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen Pembahas yang telah bersedia untuk banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dan membimbing kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak kepada Ibu, semoga keikhlasan dan ketulusan hati Ibu dalam mendidik saya selama ini mendapatkan keberkahan selalu dari Allah SWT.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Unila. Terimakasih atas segala ilmu yang telah Bapak Ibu berikan, semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis kedepannya.
8. Ibu Nur'aini dan Bapak Azhari sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar memberikan pelayanan dan membantu penulis terkait administrasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
9. Segenap Informan penelitian yaitu Bapak Drs. Putra Alam selaku Kepala Bidang KB-KR BKKBN Lampung, Bapak H. Marjuki, S.H selaku Koordinator PLKB Kota Karang Raya, Ibu Anani, S.E selaku Sekretaris Kelurahan Kota Karang Raya, serta pihak lainnya yang telah menjadi informan penulis. Terimakasih telah memberikan informasi serta waktunya demi kelancaran selama proses penelitian ini.
10. Ayah dan Ibuku tercinta. Terimakasih merupakan ucapan yang tidak seimbang dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku, yang tiada henti selalu mendoakan setiap saat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kesabaran serta memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, memberikan dukungan, semangat, dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan rezeki untuk kalian. Terimakasih banyak Ayah dan Ibu.
11. Adikku tersayang Ahmad Afandi Zultha. Terimakasih untuk semangat dan dukungannya kepadaku.
12. Keluarga Besar dan Nyaiku Hj.Halimah CH. Terimakasih atas semangat, motivasi, dan doa yang diberikan, sehingga penulis bisa sampai tahap ini.

13. Sahabatku Vanche tercinta, Merry Yana Sari, Desi Eriyanti, Puspita Cahya Rivai, Nanda Fitriani, dan Risni Anjani. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik dari awal masuk SMA sampai dengan saat ini, terimakasih atas semua kebersamaan canda tawa, kegokilan, kekonyolan, yang telah kalian ciptakan selama ini, yang selalu bikin ngakak LOL kalau sudah kumpul bareng, yang terkadang suka bikin paleng dan bikin kesel, selalu teriweh, terrumpi, terjulidta, dan pastinya terpance! Kusayang kalian, semangat terus buat kita mengejar mimpi dan cita-cita, sukses selalu genk.
14. Sahabat terbaikku yang luar biasa, Andan Rahayu, Desti Eka Rahmawati, Rindu Nova Daria Putri. Mungkin deskripsi sederhana ini hanya bisa menggambarkan sebagian dari kebaikan kalian, akan tetapi penulis akan selalu ingat kebaikan dan pertolongan kalian kepadaku. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik sekaligus saudara dari awal masuk kuliah hingga saat ini, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta motivasi, yang selalu siap membantu dan menolong kapanpun itu, yang selalu setia menemani ke kampus walaupun hanya untuk bimbingan. Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa, yang telah kalian buat selama ini, yang selalu heboh kalau lagi cerita, kalau ngomong sukanya seotot-ototan gak mau kalah, terkadang suka pundungan dan singutan, sukanya rumpi ntah apa yang dibahas, tapi itu yang buat kita nyaman. Btw, untuk Andan terimakasih karena selalu mau direpotin dan selalu setia menemani riset bolak-balik dari ujung ke ujung, untuk Desti selalu semangat ya mencari kerjanya, untuk Rindu jangan malas ngelarin skripsinya, jangan menyerah dan yakin usaha sampai. Sukses selalu!See you on top genk!SEMANGAT!

15. Sahabat terhebohku, Maya Shella Andhiny, Dewi Agustini, Jita Aryani, mereka adalah wanita baik hati, suka membantu dan menolongku, heboh, berisik, cerewet, suka banget ngerumpi kalau udah ketemu, yang hobi banget ke kampus walupun gak ada kepentingan, yang kalau berbicara harus banget ya teriak-teriak biar puas. Terimakasih teruntuk kalian yang sudah sangat membantuku dalam segala hal, terimakasih atas waktu dan kebersamaan selama berada di kampus dan di luar kampus, tetap jadi terheboh, tergupek, dan terumpi ya kalian pokoknya. Sukses selalu genk.
16. Sahabat kampusku, Meilika Ardyuansyah Zaidar, Arinta Fitriani Agnes, Elva Yonanda, Rijkiana Nuansa. A dan Syntia Bela Tama. Terimakasih sudah menjadi sahabat baikku dari awal maba hingga saat ini, yang selalu membantu penulis pada saat perkuliahan, serta kebersamaan dan cerita-cerita yang telah kalian ciptakan dari awal perkuliahan hingga sekarang.
17. Keluarga Besar Alas Menara, Zikri, Ade, Ade, Agnes, Edo, Fajar, Andan, Anggi, Arinta, Asti, Ayu Krui, Ayu M, Ayu W, Cici, Eci, Desti, Emon, Devi, Deviyona, Dewi W, Dimas, Dinda, Dwi, Nuris, Eka, Ellyza, Elva, Fela, Ghozie, Gibran, Isti, Hafiz, Hendri, Hendro, Tika, Kesy, Kaidir, Laras, Lela, Sasa, Hasby, Leo, Meilika, Iqbal, Nanda, Nca, Nita, Oca, Okke, Panji, Pindo, Yoga, Yogi, Galih, Ratu, Resqi, Respatih, Revardo, Rico, Rindu, Riska, Mala, Septya, Silvia, Uci, Syntia, Topik, Tiara, Tulva, Uki, Umar, Uun, Vania, Wahyu, Wiza, Wulan, Artha, Zulham, Ari, Arif, Bayu, Sedy, Defita, Dewi A, Fitri, Luse, Hendriko, Jita, Maya, Meylani, Okta, Pepy, Rahma, Kiana, Ala, Poni. Terimakasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan dari maba sampai sekarang. Tetap Kompak ya!

18. Keluarga Besar HIMAGARA FISIP Universitas Lampung. Terimakasih sudah menjadi keluarga selama masa perkuliahan.
19. Teman-teman KKN Desa Pekon Lok, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Udo Devolta Diningrat, Bang Imam Dermawan, Bang Rizki Hendarji Putra, Ardy Yanto, Mbak Ista Mayasari, dan Indah Permata. Terimakasih atas pengalaman dan pembelajarannya selama KKN di Pulau Pisang serta untuk kesan-kesannya selama 60 hari yang sangat berharga dan tentunya tidak akan terlupakan.
20. Terimakasih untuk semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu, yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua serta semoga tali silaturahmi diantara kita tetap terjaga dan dapat dipertemukan kembali dalam keridhoan-Nya. Amiin Yaa Rabbal' alamin.

Bandar Lampung, 27 Desember 2017
Penulis,

Nurhafifah Zultha

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kebijakan Publik	13
1. Konsep Kebijakan Publik.....	13
2. Proses Kebijakan Publik.....	15
B. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik.....	17
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	18
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik	27
C. Tinjauan Kemiskinan	28
D. Tinjauan Program Kampung KB	31
E. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Teknik Keabsahan Data	44
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum BKKBN Provinsi Lampung	48
1. Visi dan Misi	49
2. Struktur Organisasi.....	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi	50

B.	Gambaran Umum Kecamatan Teluk Betung Timur	51
1.	Visi dan Misi	52
2.	Struktur Organisasi.....	53
C.	Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang Raya	55
1.	Keadaan Penduduk.....	57
2.	Struktur Organisasi.....	59
3.	Visi dan Misi	59
V.	PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	61
1.	Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kota Bandar Lampung	62
A.	Komunikasi.....	62
B.	Sumberdaya	70
C.	Disposisi	77
D.	Struktur Birokrasi	81
2.	Faktor Penghambat Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kota Bandar Lampung	84
B.	Pembahasan.....	85
1.	Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kota Bandar Lampung	86
A.	Komunikasi.....	86
B.	Sumberdaya	92
C.	Disposisi	98
D.	Struktur Birokrasi	100
2.	Faktor Penghambat Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kota Bandar Lampung	103
VI.	KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung	5
2. Lokasi Kampung KB di Provinsi Lampung.....	7
3. Data Penduduk Miskin di Kecamatan Teluk Betung Timur.....	9
4. Perkembangan Pembinaan Kampung KB LK.1	10
5. Daftar Informan Wawancara.....	41
6. Dokumen terkait Program Kampung KB.....	42
7. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Umur.....	57
8. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Pekerjaan	57
9. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Pendidikan	58
10. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Agama	58
11. Data Staf Petugas Lapangan Kampung KB	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Kebijakan Publik	15
2. Bagan Kerangka Pikir	36
3. Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Lampung.....	50
4. Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Betung Timur.....	54
5. Struktur Organisasi Kelurahan Kota Karang Raya	59
6. Sosialisasi Program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya	64
7. Jadwal Rencana Kegiatan Program Kampung KB	68
8. Posko Kampung KB di Kantor Kelurahan Kota Karang Raya.....	76
9. Pelayanan KB di Kelurahan Kota Karang Raya	80
10. Petunjuk Teknis Kampung KB	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik hanya akan bisa diwujudkan oleh penduduk yang berkualitas baik, yang tentu tergantung pada besar jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat serta kualitas rendah tentu mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah peningkatan jumlah penduduk. Permasalahan peningkatan jumlah penduduk merupakan permasalahan penting yang dialami oleh banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia.

Besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kondisi kesejahteraan yang baik masih menjadi permasalahan pokok di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sensus penduduk tahun 2015, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 255.461.700 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 128.648.542 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 126.813.158 jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia masih akan terus meningkat setiap tahunnya.

Menyikapi permasalahan peningkatan jumlah penduduk, pemerintah Indonesia kemudian fokus menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Program KB di Indonesia dimulai sejak masa Orde Baru (1971) dan pernah terbukti mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Berdasarkan BPS, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1971-1980 adalah 2,31%. Jika dilihat dalam sepuluh tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,47% pada tahun (1990-2000). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 kurang lebih mencapai 237.556.363 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49%. Artinya, ada penambahan sekitar 3,5 hingga 4 juta penduduk setiap tahun. Dengan pertumbuhan sebesar ini, jumlah penduduk Indonesia diakhir tahun 2015 diperkirakan akan menyentuh 250 juta jiwa. Akan tetapi, dalam sepuluh tahun terakhir (2000-2010) laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali naik dan ini tentu menjadi perhatian penting bagi pemerintah agar lebih serius dalam menjalankan program KB.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini melaju dengan cepat dan mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Pada dasarnya hasil dari program KB berguna untuk pembangunan dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Upaya untuk terus memaksimalkan pelaksanaan program KB tentu menjadi pilihan mutlak bagi pemerintah saat ini. Pelaksanaan program KB Nasional dimandatkan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional sebagai sebuah lembaga non kementerian. BKKBN merupakan lembaga resmi pelaksana teknis program yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara hierarkis dan terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota,

hingga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di kecamatan dan kelurahan/desa.

Indonesia saat ini tengah menghadapi suatu persoalan yang rumit yakni masalah kemiskinan. Menurut Martono (2011:163), kemiskinan adalah salah satu dampak sosial pembangunan karena pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal (sandang, pangan dan papan). Karena sifat kemiskinan yang multidimensi tersebut, menurut Martono (2011:163), kemiskinan telah memberi akibat yang juga beragam, yaitu:

- a. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat
- b. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat
- d. Menurunnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- f. Merosotnya mutu generasi yang akan datang

Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun kian bertambah. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang sulit diatasi adalah: Pertama, laju pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan kelahiran yang tinggi, dan kebutuhan bahan pokok yang meningkat (pangan). Kedua, penyebaran penduduk tidak merata menyebabkan mobilitas yang rendah. Ketiga, peningkatan jumlah penduduk dalam umur sekolah yakni, kebutuhan dan kesempatan belajar yang meningkat, arus urbanisasi yang

meningkat, selain mengalami kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan juga pasti akan meningkat seiring dengan jumlah pengangguran tinggi dan lowongan pekerjaan yang tidak memadai. BKKBN Provinsi Lampung akan mengendalikan jumlah penduduk dan mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan menekankan program KB.

Program KB disiapkan untuk menekan jumlah penduduk dan kemiskinan. Program ini dilaksanakan di daerah yang angka kelahirannya sangat tinggi serta di daerah yang pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonominya masih terbelakang. Dengan ini jumlah penduduk dapat dikendalikan dan dapat menekan jumlah penduduk sehingga tingkat kemiskinan berkurang. Berdasarkan data BPS garis kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung tahun 2016 mencapai 13,86%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.140.000 jiwa. Jumlah penduduk di Provinsi Lampung hingga tahun 2015 telah mencapai 8.117.268 jiwa dan tahun 2016 sebanyak 8.205.144 jiwa. Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 yang mencatat jumlah penduduk Lampung sebanyak 6.730.751 jiwa, populasi hingga 2010 bertambah 12,86% dengan laju pertumbuhan 1,23% per tahun.

Kota Bandar Lampung termasuk kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pada tahun 2010-2015 laju pertumbuhan penduduk di Bandar Lampung tercatat sebanyak 2,04% serta jumlah penduduk miskin di Bandar Lampung pada tahun 2015 tercatat sebanyak 233.270 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 yaitu:

Tabel 1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	LP(%) 2011	LP(%) 2012	LP(%) 2013	LP(%) 2014	LP(%) 2015	LP(%) 2011- 2015
Lampung Barat	1,16	1,10	1,09	0,97	0,94	1,05
Tanggamus	1,39	1,33	1,29	1,22	1,19	1,28
Lampung Selatan	1,33	1,27	1,22	1,16	1,11	1,22
Lampung Timur	1,22	1,16	1,10	1,06	1,01	1,11
Lampung Tengah	1,17	1,13	1,08	1,03	0,97	1,08
Lampung Utara	0,79	0,73	0,68	0,63	0,56	0,68
Way Kanan	1,32	1,27	1,21	1,16	1,13	1,22
Tulang Bawang	1,57	1,51	1,48	1,42	1,37	1,47
Pesawaran	1,38	1,32	1,29	1,23	1,16	1,28
Pringsewu	1,16	1,14	1,09	1,03	0,99	1,08
Mesuji	0,87	0,87	0,76	0,79	0,72	0,80
Tulang Bawang Barat	1,11	1,12	0,99	1,02	0,91	1,03
Pesisir Barat	1,12	1,11	1,04	1,01	1,00	1,05
Bandar Lampung	2,14	2,08	2,04	1,98	1,94	2,04
Kota Metro	1,78	1,70	1,59	1,61	1,55	1,65

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan tabel 1, Kota Bandar Lampung memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Bandar Lampung pada tahun 2011-2015 tercatat sebanyak 2,04%. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk sebanyak 2,14%, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 2,08%, pada tahun 2013 sebanyak 2,04%, tahun 2014 sebanyak 1,98%, dan pada tahun 2015 sebanyak 1,94%.

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Bandar Lampung berjumlah 885.363 jiwa, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 904.322 jiwa, kemudian pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat sebanyak 923.175 jiwa dan kembali mengalami peningkatan menjadi 942.039 jiwa pada tahun 2013, pada tahun 2014 sebanyak 960.695 jiwa, kemudian pada tahun 2015 jumlah penduduk bertambah

sebanyak 979.287 jiwa, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 997.728 jiwa pada tahun 2016. Karenanya, dengan program KB diharapkan menjadi pintu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Manusia hidup bukan hanya untuk sekedar hidup, seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan saja, mereka memerlukan kualitas hidup yang baik. Hal-hal yang menunjang agar manusia dapat menciptakan hidup yang berkualitas adalah dengan mempunyai pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, dan juga adanya rasa aman serta kesehatan.

BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional membuat terobosan baru yaitu “Program Kampung KB” atau lengkapnya “Program Kampung Keluarga Berencana”. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga berencana juga. Oleh karena itu pemerintah provinsi telah mencanangkan program Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB di Provinsi Lampung.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 146/111.21/HK/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Lampung membentuk Kampung KB. Program Kampung KB merupakan salah satu gerakan membangun desa dan termasuk dalam program penanggulangan

kemiskinan. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas (<https://www.teraslampung.com/pemprov-dan-bkkbn-tetapkan-15-kampung/> diakses pada tanggal 16 Desember 2016).

Tabel 2. Lokasi Kampung KB di Provinsi Lampung

Kabupaten/kota	Lokasi	Jumlah Penduduk
Lampung Selatan	Dusun Sukapura Desa Tanjung Raya, Palas	319 jiwa
Lampung Tengah	Dusun IV Gunung Agung, Terusan Nunyai	763 jiwa
Lampung Utara	Dusun Muara Balak, Sungkai Barat	1890 jiwa
Bandar Lampung	Kota Karang Raya, Teluk Betung Timur	3273 jiwa
Lampung Barat	Dusun I Desa Mekar Sari, Pagar Dewa	579 jiwa
Tulang Bawang	Dusun I Desa Banjar Aji, Gedung Aji	709 jiwa
Tanggamus	Dusun V Desa Pekon Balak, Wonosobo	1161 jiwa
Metro	Hadimulyo Barat, Kota Metro	1306 jiwa
Lampung Timur	Dusun I Pakuan Aji, Sukadana	871 jiwa
Way Kanan	Dusun Bangun Rejo, Way Tuba	69 jiwa
Pesawaran	Dusun V Pulau Pahawang, Marga Punduh	599 jiwa
Pringsewu	Dusun II Desa Sukoharjo	501 jiwa
Mesuji	Dusun IV Desa Sungkai Cambai, Mesuji	764 jiwa
Tulang Bawang Barat	Dusun IV Desa Bujung Dewa, Pagar Dewa	1298 jiwa
Pesisir Barat	Dusun I Desa Pakuan Aji, Karya Pengawa	248 jiwa

Sumber: Data BKKBN Provinsi Lampung, 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN Provinsi Lampung, sebanyak 15 kabupaten/kota terpilih sebagai lokasi kampung KB di Provinsi Lampung, salah satunya yaitu, Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur,

Kota Bandar Lampung, karena kelurahan tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara desa atau kecamatan yang terpilih sebagai Kampung KB di Provinsi Lampung. Kelurahan Kota Karang Raya terpilih sebagai pusat pencaangan Kampung KB tingkat Kota Bandar Lampung pada tahun 2016.

Kelurahan Kota Karang Raya merupakan salah satu dari kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur. Luas wilayah kelurahan tersebut 22Ha dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6104 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1531 KK. Jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Teluk Betung Timur, dari sisi KKBPK kondisi kelurahan Kota Karang Raya termasuk yang mempunyai jumlah penduduk miskin paling tinggi. Kelurahan Kota Karang terpilih sebagai Kampung KB dikarenakan data penduduk keluarga berencana pada metode keluarga berencana jangka panjang di kelurahan Kota Karang Raya paling rendah diantara kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Dimana kelurahan Kota Karang Raya mayoritas penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai pekerja lepas, nelayan dan pemulung, penduduk yang tinggal di kelurahan tersebut mayoritas hanya tamatan SD dan SMP, serta termasuk dalam daerah kumuh yang angka kelahirannya tidak terkendali, dan sering terjadinya pernikahan dini (http://lenteraswaralampung.com/berita-1072-kota-karang-raya-dipilih-jadi-kampung_kb.html diakses pada tanggal 16 Desember 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya yaitu melalui program Kampung KB. Kelurahan Kota Karang Raya menjadi salah satu dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan

Teluk Betung Timur dengan partisipasi peserta KB aktif atau PA MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terendah dari kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut. Dari data yang didapatkan Kelurahan Kota Karang Pa MKJP 21.8%, Kota Karang Raya 18.6%, Perwata 18.8%, Keteguhan 19.0%, Sukamaju 24.1 dan Way Tataan 23.7%. Dapat disimpulkan bahwa peserta PA MKJP tertinggi berada di Kelurahan Sukamaju dan PA MKJP terendah berada di Kelurahan Kota Karang Raya (*Sumber: Data Kecamatan Teluk Betung Timur, 2016*).

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang Raya memiliki tingkat keluarga sejahtera dengan jumlah penduduk miskin paling banyak diantara kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur. Tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS), keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar termasuk kategori sangat miskin. Keluarga Sejahtera I (KS I), keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar termasuk kategori miskin. Sedangkan Keluarga Sejahtera II (KS II), keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial termasuk kategori keluarga menengah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Data Penduduk Miskin di Kecamatan Teluk Betung Timur

No	Kelurahan	KPS dan KS I
1	Kelurahan Kota Karang Raya	70,7%
2	Kelurahan Way Tataan	54,7%
3	Kelurahan Kota Karang	63,7%
4	Kelurahan Perwata	48,6%
5	Kelurahan Keteguhan	59,8%
6	Kelurahan Sukamaju	51,9%

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Teluk Betung Timur, 2016

Berdasarkan tabel 3, dapat dibandingkan dengan lima kelurahan lain yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur, dari sisi KKBPK kondisi kelurahan Kota Karang Raya termasuk yang mempunyai jumlah penduduk miskin (KPS dan KS I) paling tinggi, sebesar 70,7 % dengan data tahapan keluarga berupa tahap KPS: 59 KK (sangat miskin), KS I: 576 KK (miskin), dan KS II: 144 KK pada kategori keluarga menengah.

Tabel 4. Perkembangan Pembinaan Kampung KB LK.1

Data/sasaran	Kondisi Awal LK 1	Perkembangan			
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Jumlah penduduk	3273 Jiwa	3362 Jiwa	3372 Jiwa	3378 Jiwa	3386 Jiwa
Jumlah kepala keluarga	762 KK	787 KK	791 KK	793 KK	797 KK
Jumlah pasangan usia subur	549 PUS	555 PUS	559 PUS	563 PUS	567 PUS
Jumlah balita (0-5tahun)	276 Anak	281 Anak	283 Anak	285 Anak	286 Anak
Jumlah remaja (10-24tahun)	351 Remaja	361 Remaja	379 Remaja	380 Remaja	381 Remaja
Jumlah Lansia (60thn keatas)	179 Lansia	181 Lansia	188 Lansia	189 Lansia	190 Lansia
Jumlah KLP kegiatan KB	8 Klp	8 Klp	8 Klp	8 Klp	8 Klp

Sumber: Data BKKBN Provinsi Lampung, 2016

Tabel 4, dari data hasil pra riset yang dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Timur dengan informan Bapak Marjuki, S.H, selaku PKBL Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, peneliti memperoleh informasi terkait program Kampung KB. Sejak program Kampung KB dijalankan pada bulan Maret 2016 sampai saat ini tercatat jumlah penduduk di Kelurahan Kota Karang Raya pada Lingkungan 1 tahun 2016 kian mengalami penurunan secara bertahap. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 4.276 jiwa, tahun 2015

sebanyak 3.891 jiwa, dan pada tahun 2016 sejak program Kampung KB dijalankan jumlah penduduk mengalami penurunan yaitu menjadi 3.273 jiwa.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program Kampung KB dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program Kampung KB dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan program KB, khususnya pada BKKBN Provinsi Lampung, dan Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Anderson dalam Mulyadi (2016:165), mendefinisikan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Nugroho dalam Mulyadi (2016:165), mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

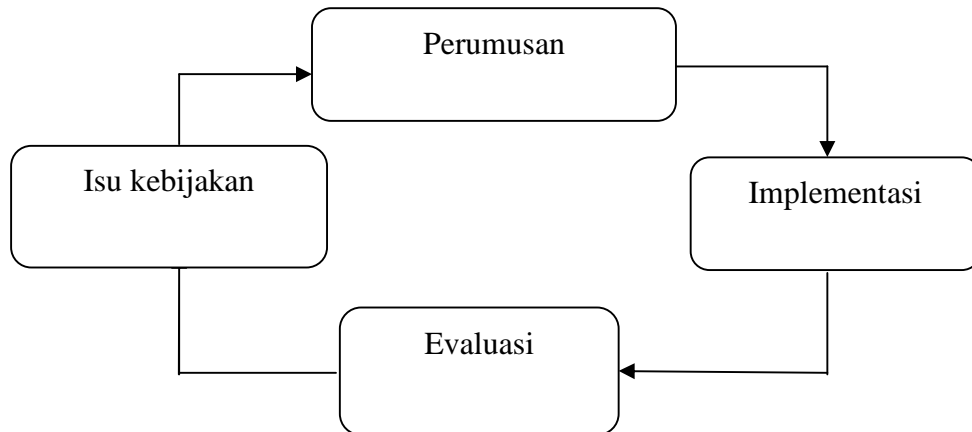
Menurut Dye dalam Suaib (2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan pemerintah.

Jenkin dalam Suaib (2016:74), mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Proses Kebijakan Publik

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan publik sebagai berikut:



Sumber: Nugroho (2014:199)

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut:

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema di atas, terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan;
2. Implementasi kebijakan;
3. Evaluasi kebijakan dan, dengan penambahan;
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Diantara proses-proses kebijakan publik tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tahap implementasi kebijakan publik.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135), mengatakan bahwa proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision*” yaitu implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Grindle dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan kedua apakah tujuan program tercapai. Tahap implementasi kebijakan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:139), proses implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari proses kebijakan tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan

Waldo dalam Suaib (20016:86) menyatakan bahwa model implementasi adalah saran untuk mengurangi semua konsepsi tentang sifat, realitas, atau universal, yang berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman terhadap sesuatu atau menggunakan analogi, dimana pengkonsepsian sesuatu yang belum diketahui didasarkan pada sesuatu yang sudah diketahui, serta dengan menggunakan metafora untuk memperoleh kejelasan suatu fenomena. Model-model

implementasi ada yang bersifat abstrak, adapula yang bersifat lebih operasional. Berikut adalah model-model implementasi kebijakan dalam perkembangannya yaitu:

2.1 Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan kebijakan

publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap Kecenderungan (*disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya

tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.2 Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:144), variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan pada proses implementasi dapat dikategorikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

- a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur
 - c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
- Pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pihak-pihak luar
3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, yaitu:
- a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

2.3 Model Implementasi George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik lainnya yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu

menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten

dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap payung hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Berdasarkan dari penjelasan beberapa teori diatas mengenai implementasi kebijakan publik, maka dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III yang menyatakan terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, karena program Kampung KB bersifat *Top-Down*, artinya program tersebut dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, untuk menuruni angka kelahiran tinggi serta dapat mengendalikan angka kemiskinan.

Dimana variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Edward III merupakan variabel yang menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya. Untuk lebih memperjelas dan memperkuat teori yang peneliti pakai, peneliti mengambil dua jurnal yang menggunakan teori implementasi Edward III, dengan judul penelitian “*Analisis Implementasi Kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kecamatan Palu Timur Kota Palu*” dan “*Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda*” dimana dua jurnal tersebut menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang bersifat *top down* dalam konteks yang sama yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2011:59), Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal), yaitu:

- a. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas *input* yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan.
- b. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses

implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

C. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Chambers dalam Suryawati (2005:122), kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan menurut Chambers dalam Suryawati (2005:122) dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
 2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005:123), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *International processes*, adalah bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

4. *Internal political fragmentation and civil strife*, adalah suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
5. *Resources management and the environment*, adalah unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
6. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
7. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
8. *Population growth*, adalah perspektif yang didasari bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
9. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana kelompok masyarakat mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar yang lain, sehingga kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan sosialnya rendah.

D. Program Kampung Keluarga Berencana

1. Konsep Kampung KB

Menurut data BKKBN Provinsi Lampung (2016), program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan program Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2. Tujuan Kampung KB

Menurut data BKKBN Provinsi Lampung (2016), terdapat dua tujuan pada program Kampung KB yaitu:

- a. Tujuan umum:
 1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- b. Tujuan khusus:
 1. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
 3. Meningkatkan peserta KB aktif modern.
 4. Meningkatkan Ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
 5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UPPKS).
 6. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
 7. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
 9. Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
 10. Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah
 11. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.

3. Prasyarat Pembentukan Kampung KB

Menurut data BKKBN Provinsi Lampung (2016), proses pembentukan suatu wilayah akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.
- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

4. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Menurut data BKKBN Provinsi Lampung (2016), dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

- a. Kriteria Utama
 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu:
 1. Kumuh
 2. Pesisir atau Nelayan
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
 4. Bantaran Kereta Api
 5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
 6. Terpencil
 7. Perbatasan
 8. Kawasan Industri
 9. Kawasan Wisata
 10. Padat Penduduk.
- c. Kriteria Khusus
 1. Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.
 2. Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

3. Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

E. Kerangka Pikir

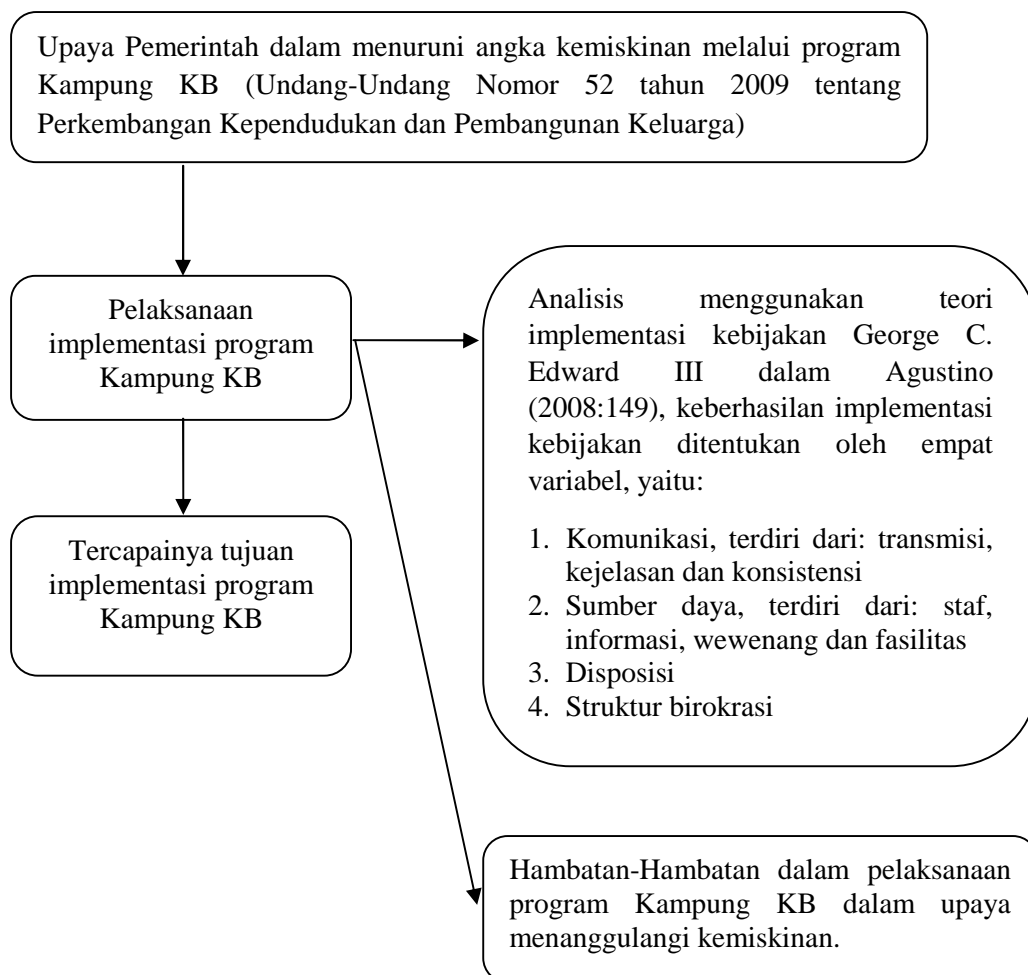
Keberhasilan pembangunan nasional sangat memerlukan dukungan penuh dari unsur-unsur masyarakat dan bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah. Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan termasuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program KB.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan Keluarga Berencana juga. Oleh karena itu pemerintah telah membuat kebijakan Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya melalui program Kampung KB.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Begitu juga dengan program Kampung KB, program ini harus diimplementasikan dengan baik melalui prosedur ini proses kebijakan

secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan menggunakan empat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik. Empat variabel tersebut diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara jelas kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4), berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi, dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi program Kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2015:208) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Berdasarkan UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan KB juga.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung:
 - a. Komunikasi yang berkenaan dengan:
 - 1) Penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan program Kampung KB.
 - 2) Kejelasan penyampaian informasi tentang pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, yaitu meliputi tujuan serta waktu pelaksanaan.
 - 3) Konsistensi tentang pelaksanaan program kampung KB dan konsistensi penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program Kampung KB.
 - b. Sumber daya yang berkenaan dengan:
 - 1) Sumber daya manusia dalam program ini yang memiliki kewenangan dalam implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung.

- 2) Sumber daya non manusia seperti fasilitas dan wewenang yang mendukung implementasi tersebut.
 - c. Disposisi, kecenderungan sikap positif pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.
 - d. Struktur birokrasi yang berkenaan dengan:
Standard Operating Procedures (SOP) adalah mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam implementasi program Kampung KB serta fragmentasi yang meliputi upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013:128) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Sedangkan unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa

organisasi dalam skala kecil dan terbatas. Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kota Bandar Lampung.

Instansi-instansi yang akan menjadi lokasi penelitian ini yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, karena kelurahan tersebut mempunyai angka kemiskinan yang tinggi, serta termasuk daerah kumuh yang angka kelahirannya tinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2013:186), wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya.

Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), PLKB Kota Karang Raya, sekretaris lurah Kota Karang Raya, serta masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang dijadikan informan penelitian adalah:

Tabel 5. Daftar Informan Wawancara

No	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Bapak Drs. Putra Alam	Kabid Keluarga Berencana BKKBN Lampung	Senin, 25 September 2017
2	Bapak Hi. Marjuki, S.H	Koordinator PLKB Kampung KB Kota Karang Raya	Senin, 25 September 2017
3	Ibu Anani, S.E	Sekretaris Lurah Kota Karang Raya	Selasa, 26 September 2017
4	Ibu Mariah	Masyarakat Kelurahan Kota Karang Raya	Selasa, 26 September 2017
5	Ibu Lisnawati	Masyarakat Kelurahan Kota Karang Raya	Selasa, 26 September 2017
6	Ibu Iin	Masyarakat Kelurahan Kota Karang Raya	Selasa, 26 September 2017
7	Ibu Nina Karmila	Masyarakat Kelurahan Kota Karang Raya	Selasa, 26 September 2017

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

2. Dokumentasi

Sugiyono (2015:240) menyatakan studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun

gambar yang berkaitan dengan program Kampung KB. Adapun dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan, antara lain:

Tabel 6. Dokumen terkait Program Kampung KB

No	Dokumen
1	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2	Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 146/111.21/HK/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.
3	Petunjuk Teknis Program Kampung KB oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Lampung.
4	Laporan Perkembangan Program Kampung KB Provinsi Lampung oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Lampung.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2017

3. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2015:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perogram Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2015:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246), terdapat tiga komponen analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada di lapangan kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian pelaksanaan program Kampung KB dan mana yang bukan, kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:270) meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji kredibilitas

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kredibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan antara lain:

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga metode triangulasi:

- 1) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.
- 2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

- 3) Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

2. Pengujian *Transferability*

Dalam *transferability* peneliti harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya “semacam apa” suatu hasil penelitian diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Pengujian *Depenability*

Uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *depenability* nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *depenability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan penelitian oleh auditor yang *independence* atau pembimbing.

4. Pengujian *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya tidak ada.

Peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang berbeda). Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana yang berbeda dan mana yang spesifik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung

Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program keluarga berencana nasional yang secara resmi dimulai pada tahun 1970. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, lembaga ini berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan tugas utama urusan program keluarga berencana dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pengelolaan program KB ditingkat Provinsi masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. Sejak tahun 2003

sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu:

1. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Provinsi Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program KB di Provinsi Lampung.
2. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Lampung

Visi dan misi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung adalah:

a. Visi

Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

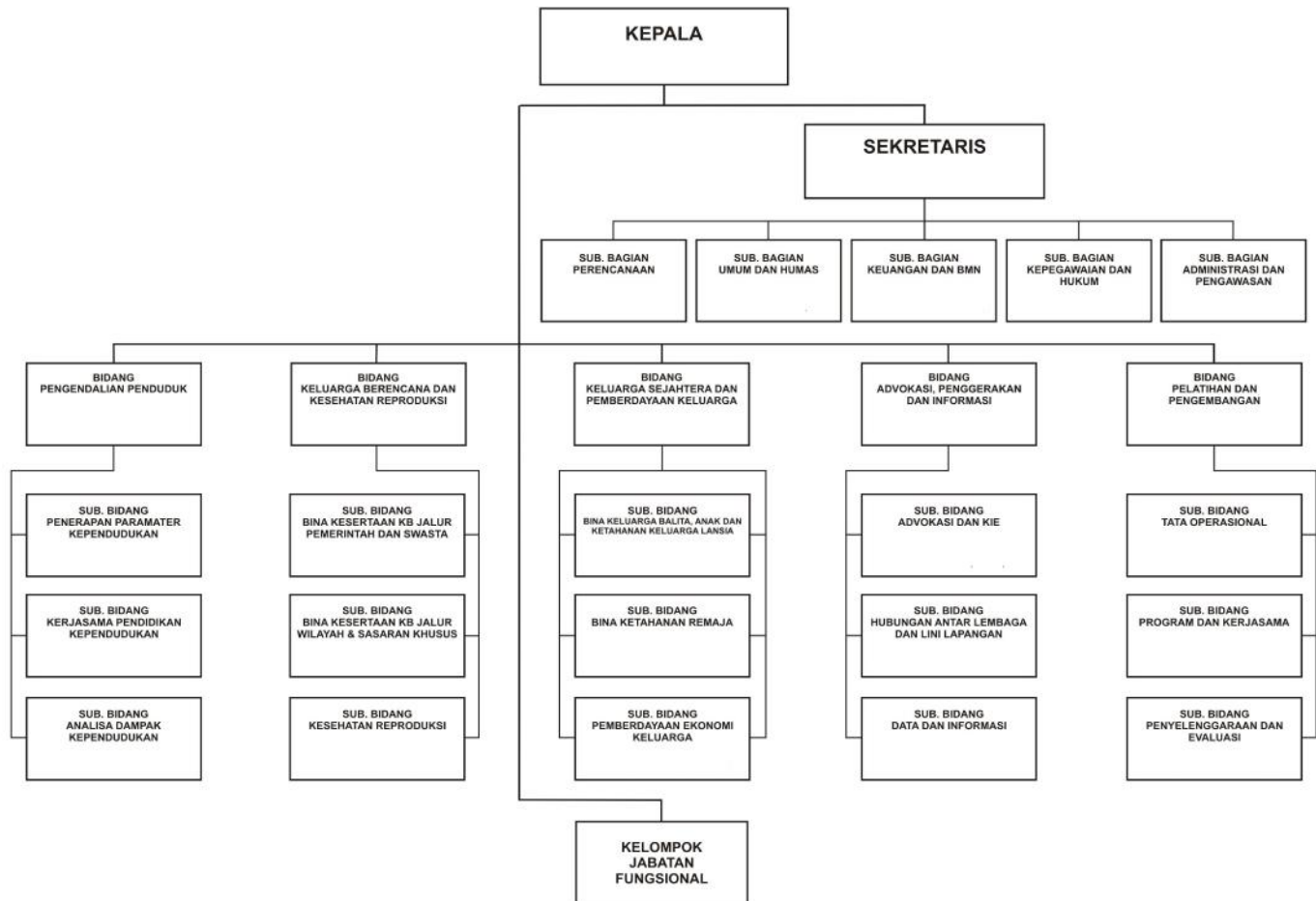
b. Misi

- 1) Mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 3) Memfasilitasi pembangunan keluarga
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut:



Sumber: Data BKKBN Provinsi Lampung, 2017

Gambar 3. Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Lampung

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi

Lampung sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, BKKBN menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KB
- 2) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN
- 5) Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KB

B. Gambaran Umum Kecamatan Teluk Betung Timur

Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Kecamatan Teluk Betung Timur berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif. Kecamatan Teluk Betung Timur dengan luas wilayah 1.210 Ha, yang terletak antara 4-50 meter dari permukaan laut. Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung dan Kecamatan Teluk Betung Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Selatan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kabupaten Pesawaran

Kecamatan Teluk Betung Timur secara administratif dibagi menjadi enam Kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Kota Karang
- 2) Kelurahan Kota Karang Raya
- 3) Kelurahan Perwata
- 4) Kelurahan Keteguhan
- 5) Kelurahan Sukamaju
- 6) Kelurahan Way Tataan

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur berada di Kelurahan Sukamaju. Kecamatan Teluk Betung Timur secara geografis merupakan wilayah pantai yang membujur dari Timur kearah Barat pantai Teluk Lampung. Berdasarkan angka proyeksi tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Teluk Betung Timur mencapai 38.821 jiwa penduduk tetap berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki mencapai 19.908 jiwa lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 18.913 jiwa. Kepala keluarga di kecamatan ini berjumlah 9.995 KK, dengan luas 1.210 Ha. Di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur adat istiadat pada kalangan masyarakat tidak mengikat, dikarenakan penduduk di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, dan agama.

1. Visi dan Misi Kecamatan Teluk Betung Timur

a. Visi

Terwujudnya kesejahteraan dan tertib administrasi pemerintahan pembangunan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan serta

administrasi tata pemerintahan kelurahan yang baik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dengan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan upaya kebersihan lingkungan
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan kebijakan teknis baik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat
- 5) Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan menerapkan, menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan di Kelurahan

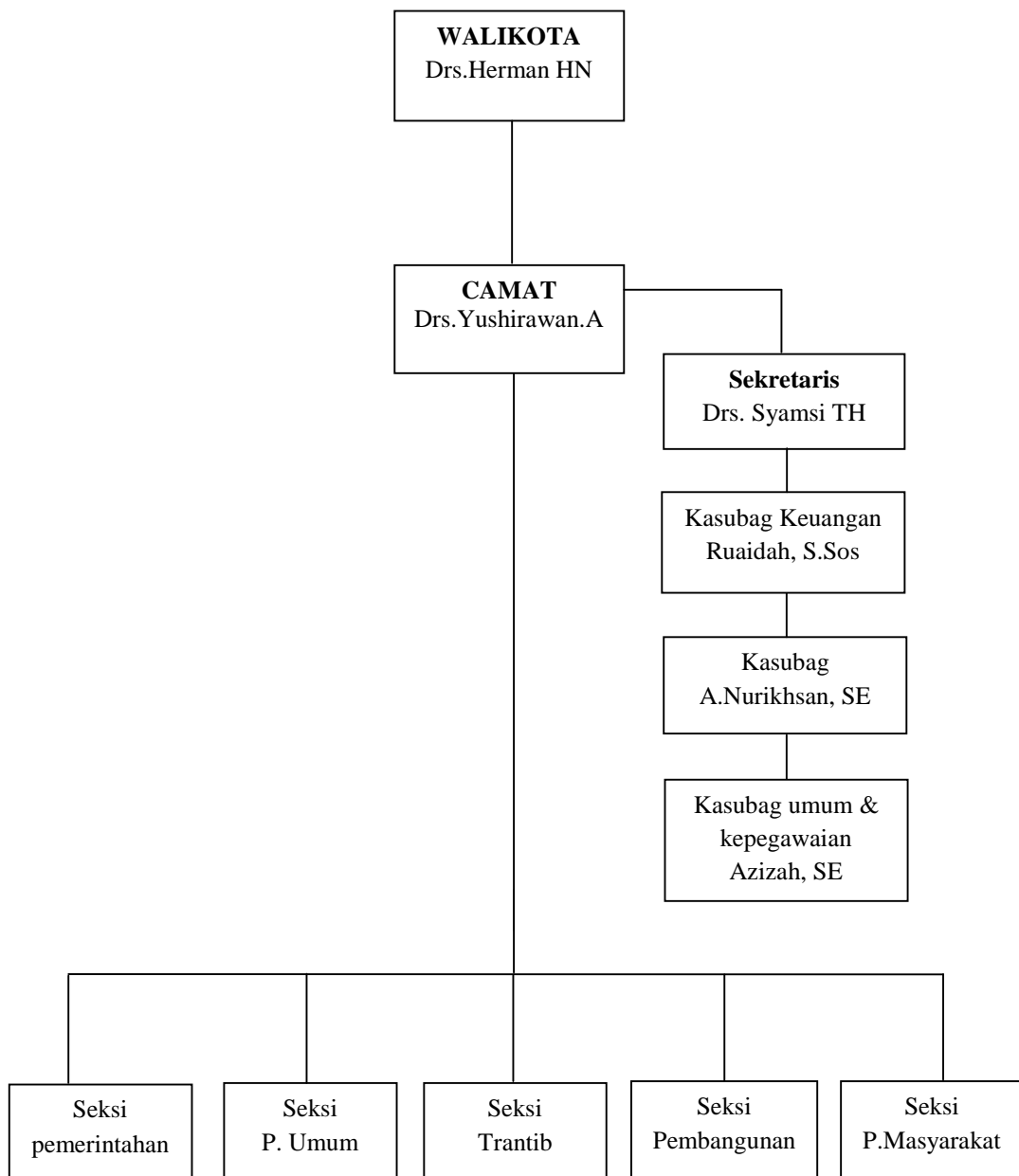
2. Struktur Organisasi

Struktur organisai Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum

- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi pembangunan
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Bagan struktur organisasi Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Kecamatan Teluk Betung Timur, 2017

Gambar 4. Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Betung Timur

C. Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang Raya

Kelurahan Kota Karang Raya merupakan salah satu dari kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur yang mempunyai garis batas pantai (daerah pesisir) dan merupakan pemekaran wilayah Kelurahan Kota Karang. Kelurahan Kota Karang Raya terbagi menjadi dua wilayah lingkungan yaitu, Lingkungan I terdiri dari delapan Rukun Tetangga, dan Lingkungan II terdiri dari tujuh Rukun Tetangga. Batas wilayah Kelurahan Kota Karang Raya yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kota Karang
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Keteguhan
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut/Teluk Lampung
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Perwata

Kelurahan Kota Karang Raya memiliki jalan beraspal dengan lebar ± 5 m sepanjang 3 km, akses jalan masuk ke perumahan/permukiman sebagian sudah disemen akan tetapi jalan tersebut sangat sempit dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Sedangkan akses jalan masuk ke perumahan yang berada di atas air laut hanya menggunakan jembatan kayu sebagai penghubung antar rumah yang satu ke rumah yang lain dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Sarana pendidikan ada satu Sekolah Dasar, satu Madrasah, satu Masjid, dan tujuh Mushala. Sedangkan sarana unit kesehatan terdapat satu puskesmas.

Kelurahan Kota Karang Raya menjadi salah satu Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung yang terpilih sebagai pelaksana program yang telah dibuat oleh Pemerintah yaitu program Kampung KB. Program Kampung KB bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat ditingkat kampung/desa serta meningkatkan

kualitas hidup masyarakat pada bidang pelayanan KB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PLKB Kota Karang Raya, Bapak Marjuki menyatakan bahwa, sebelum program Kampung KB dijalankan di Kelurahan Kota Karang Raya, kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang paling rendah dari sisi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Masyarakat Kelurahan Kota Karang Raya sebagian besar hanya bermata pencarian sebagai nelayan dan buruh serta tingkat pendidikan di Kelurahan tersebut tergolong rendah. Masyarakat di Kelurahan Kota Karang Raya sebagian masih ada yang tidak paham terkait pentingnya cara ber KB pada zaman ini serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KB. Dari segi infrastruktur Kelurahan Kota Karang Raya masih sangat kurang seperti jalan yang masih tanah, sistem drainase dan gorong-gorong yang masih suka tersumbat dikarenakan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Sejak program Kampung KB dicanangkan di Kelurahan Kota Karang Raya, pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan program Kampung KB menjadi lebih maksimal. Karena sejak adanya program ini masyarakat di Kelurahan tersebut tidak perlu susah-susah lagi jika ingin melakukan KB, karena dalam program ini pelayanan KB yang diberikan oleh pihak penanggung jawab diberikan secara gratis di puskesmas kelurahan. Pelaksanaan posyandu yang tadinya tidak dilaksanakan secara rutin, sekarang telah dilaksanakan secara rutin yaitu setiap seminggu sekali. Sarana dan prasarana dalam segi infrastruktur yang telah terlaksana dan terlihat hasilnya yaitu perbaikan jalan yang sudah di paving, pemasangan lampu jalan, pembuatan MCK, sudah adanya grobak pembuangan sampah, perbaikan gorong-gorong dan sistem drainase.

1. Keadaan Penduduk

Kelurahan Kota Karang Raya memiliki luas wilayah seluas 22 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 6.104 jiwa. Terdiri dari 3.076 jiwa penduduk laki-laki dan 3.029 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.531 KK (*Sumber: Data Kelurahan Kota Karang Raya, 2017*).

Tabel 7. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Umur

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0-4 tahun	462 jiwa
2	5-6 tahun	368 jiwa
3	7-13 tahun	755 jiwa
4	14-16 tahun	489 jiwa
5	17-24 tahun	857 jiwa
6	25-54 tahun	2463 jiwa
7	55 tahun keatas	710 jiwa

Sumber: Data Kelurahan Kota Karang Raya, 2017

Berdasarkan tabel 7, pada kelurahan Kota Karang Raya usia 25-54 tahun memiliki jumlah paling banyak yaitu sebesar 2.463 jiwa, sedangkan usia 5-6 tahun paling sedikit yaitu, 368 jiwa.

Tabel 8. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Pekerjaan

No	Golongan Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	32 jiwa
2	TNI	9 jiwa
3	Berdagang	344 jiwa
4	Petani	37 jiwa
5	Tukang	143 jiwa
6	Buruh	1534 jiwa
7	Pensiunan	33 jiwa
8	Lain-Lain	3972 jiwa

Sumber: Data Kelurahan Kota Karang Raya, 2017

Berdasarkan tabel 8, mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kota Karang Raya paling banyak bekerja sebagai buruh dengan jumlah 1.534 jiwa, sedangkan golongan pekerjaan paling sedikit yaitu TNI hanya 9 jiwa. Selain itu, jumlah penduduk di Kelurahan Kota Karang Raya dari tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel 9, yaitu:

Tabel 9. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	107 jiwa
2	D3	55 jiwa
3	SLTA	1328 jiwa
4	SLTP	1381 jiwa
5	SD	2365 jiwa
6	TK	224 jiwa
7	Belum Sekolah	580 jiwa
8	Buta Huruf	64 jiwa

Sumber: Data Kelurahan Kota Karang Raya, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah penduduk di Kelurahan Kota Karang Raya tingkat pendidikan yang paling besar yaitu Sekolah Dasar berjumlah 2.365 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan D3 yang terendah, hanya berjumlah 55 jiwa.

Tabel 10. Data Penduduk Kelurahan Kota Karang Raya Menurut Agama

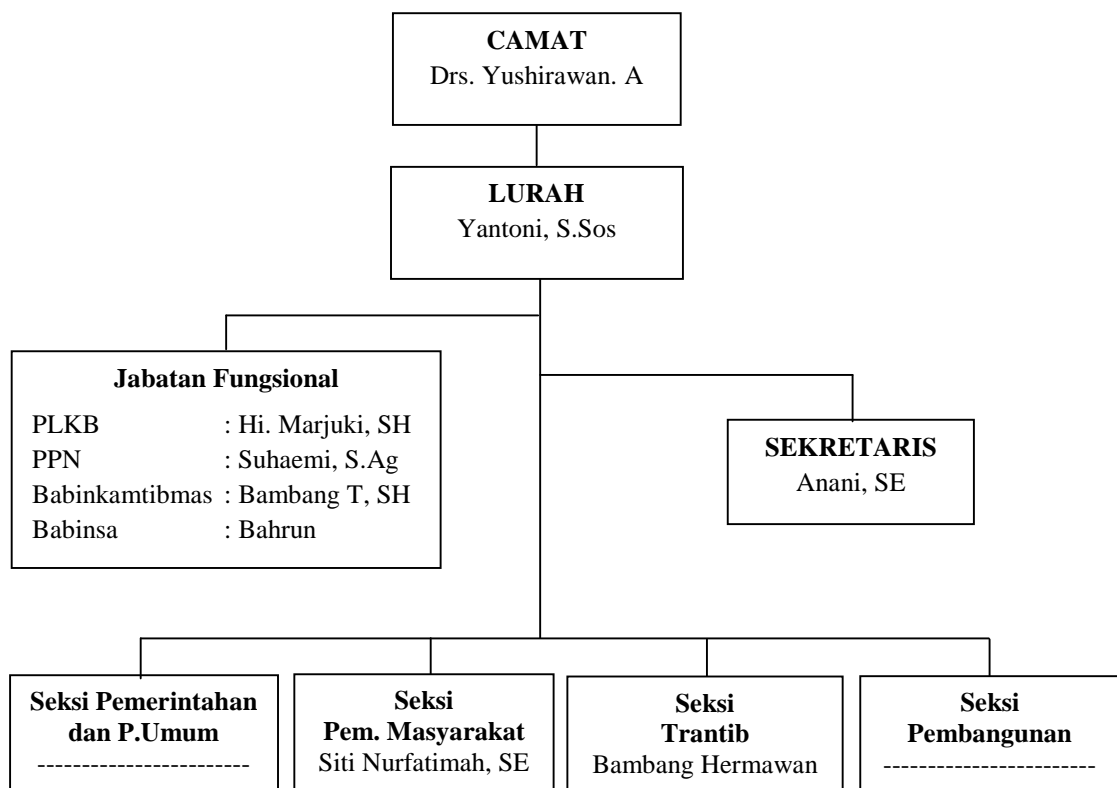
No	Agama	Jumlah
1	Islam	5584 jiwa
2	Kristen Protestan	56 jiwa
3	Kristen Katolik	90 jiwa
4	Budha	68 jiwa
5	Hindu	6 jiwa

Sumber: Data Kelurahan Kota Karang Raya, 2017

Pada tabel 10, penduduk di Kelurahan Kota Karang Raya mayoritas beragama islam dengan jumlah terbanyak yaitu 5.584 jiwa, sedangkan penduduk beragama hindu yang terdikit hanya berjumlah 6 jiwa.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sebagai berikut:



Sumber: Data Kecamatan Teluk Betung Timur, 2017

Gambar 5. Struktur Organisasi Kelurahan Kota Karang Raya

3. Visi dan Misi Kelurahan Kota Karang Raya

Visi dan misi Kelurahan Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur adalah:

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur kelurahan (*good government*).

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dengan misi sebagai berikut:

- 1) Tercapainya tertib administrasi pelayanan.
- 2) Terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan berkualitas.
- 3) Tercapainya profesionalitas aparatur yang berjiwa melayani, bukan untuk dilayani.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung
 1. Komunikasi pada pelaksanaan program Kampung KB yang terdiri dari beberapa indikator diantaranya yaitu, transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya sudah berjalan dengan baik.
 2. Sumberdaya pada pelaksanaan program Kampung KB yang terdiri dari empat indikator yaitu, sumberdaya manusia (staf), informasi, wewenang, dan fasilitas dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya masih belum berjalan dengan baik, karena salah satu indikator sumberdaya yaitu fasilitas yang tersedia masih kurang memadai.

3. Disposisi dalam pelaksanaan program Kampung KB sudah berjalan dengan baik. Para pelaksana kebijakan mempunyai sikap dan motivasi yang tinggi terhadap program tersebut. Serta masyarakat mendukung adanya program Kampung KB dan merupakan salah satu kegiatan untuk menanggulangi angka kemiskinan.
 4. Struktur Birokrasi dalam mendukung kinerja pelaksana program Kampung KB sudah terdapat SOP dan fragmentasi telah berjalan dengan baik dan efektif karena telah sesuai dengan peran dan tugas pelaksana dalam program ini.
- b) Dalam pelaksanaan program ini terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Kampung KB diantaranya faktor internal yaitu kurangnya anggaran berupa dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program Kampung KB, karena program tersebut belum mempunyai alokasi khusus dalam anggarannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat yang masih belum ikut serta dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Kota Karang Raya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam implementasi program Kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung adalah:

1. Sebaiknya fasilitas seperti Posko Kampung KB dibuat terpisah dari kantor Kelurahan Kota Karang Raya. Selain itu jika mempunyai posko tersendiri

dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dan akan menjadi lebih efektif karena tidak akan mengganggu pelayanan di kantor Kelurahan Kota Karang Raya.

2. Untuk mengatasi respon masyarakat yang masih rendah, pihak BKKBN Lampung selaku penanggung jawab dari program Kampung KB harus bisa menguatkan partisipasi masyarakat kepada masyarakat yang terlibat dalam program Kampung KB, serta lebih rutin melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pelayanan KB secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif, Modern, Posmodern, dan Poskolonial)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: PT Buku Seru.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 146/111.21/HK/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

Petunjuk Teknis Program Kampung KB oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Lampung.

Laporan Perkembangan Program Kampung KB Provinsi Lampung oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Lampung.

Jurnal:

Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional: *JMPK*. Vol 08, No.3.

Nirwan. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kecamatan Palu Timur di Kota Palu. Palu: *e-Jurnal Katalogis*. Vol 1, No. 7.

Rizki Alawiyah. 2016. Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Samarinda: *e-Jurnal Administrasi Negara*. Vol 4, No.4.

Sumber lain:

<https://lampung.bps.go.id>

<https://www.teraslampung.com/pemprov-dan-bkkbn-tetapkan-15-kampung/>

[http://lenteraswaralampung.com/berita-1072-kota-karang-roya-dipilih-jadi-kampung kb.html](http://lenteraswaralampung.com/berita-1072-kota-karang-roya-dipilih-jadi-kampung-kb.html)